

Akbar Tandjung:

## Golkar Harus Gelar Munaslub Ganti Setya Novanto

Reporter: **Antara**

Editor: **Ninis Chairunnisa**

Minggu, 19 November 2017 07:25 WIB

[https://nasional.tempo.co/read/1035053/akbar-tandjung-golkar-harus-gelar-munaslub-ganti-setya-novanto?TerkiniUtama&campaign=TerkiniUtama\\_Click\\_1](https://nasional.tempo.co/read/1035053/akbar-tandjung-golkar-harus-gelar-munaslub-ganti-setya-novanto?TerkiniUtama&campaign=TerkiniUtama_Click_1)



*Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung. TEMPO/Imam Sukanto*

TEMPO.CO, Medan - Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Akbar Tandjung menyarankan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar segera menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) terkait status hukum yang dihadapi Ketua Umum Partai Golkar [Setya Novanto](#). Menurut dia, langkah itu perlu segera diambil untuk menyelamatkan partai.

"Yang paling efektif, paling memiliki legitimasi tinggi dan efektif melalui Munas," kata Akbar di sela menghadiri Munas Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Ke-10 di Medan, Sumatera Utara pada Sabtu, 18 November 2017.

Baca: [Mahyudin: Golkar Tetap Mempertahankan Setya Novanto](#)

Akbar mengatakan hasil survei menunjukkan elektabilitas Partai Golkar menurun dan hanya meraih enam persen. Menurut dia, sedikit banyak hal tersebut dipengaruhi oleh masalah hukum yang sedang dihadapi pucuk pimpinan partai, yaitu Setya Novanto.

"Yang saya takutkan raihannya empat persen kalau kurang dari empat persen maka Golkar tidak akan memiliki perwakilan di DPR karena di bawah ambang batas," kata Akbar.

Baca: [Setya Novanto Bermasalah, Rakernas Partai Golkar Tetap Digelar](#)

Menurut Akbar, Golkar harus mencari pengganti Setya sebagai Ketua Umum dengan memilih pemimpin yang tidak terkontaminasi masalah hukum. Selain itu, pemimpin Partai Golkar harus membawa tema baru dan tidak berkepentingan pribadi. Dengan begitu, ia optimis citra Partai Golkar akan kembali membaik jika seluruh kader berjuang dan komitmen membawa perubahan menjelang agenda tahun politik 2018 dan 2019.

Akbar pun menyarankan [Setya Novanto](#) untuk fokus menjalani proses hukum setelah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Setya sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP. Apalagi, nama sejumlah perusahaan keluarga Setya disebut terlibat proyek tersebut.